

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan ilmu pengetahuan dan kompetensi anak bangsa mutlak ditentukan oleh tingkat perkembangan dunia pendidikan, semakin baik pengelolaan dan perkembangannya maka kualitas dan mutu pendidikan semakin terjamin, karena pengelolaan atau proses perkembangan pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan baik tidaknya kualitas pendidikan di suatu lembaga khususnya dan pendidikan bangsa Indonesia pada umumnya. Hal ini dapat dilihat manakala sebuah lembaga pendidikan dalam penyelenggaraannya benar-benar baik, maka tingkat kualitasnya pun akan baik, berbeda dengan lembaga pendidikan yang melaksanakan kegiatan pendidikan hanya dengan sekadarnya (asal selesai) maka hasilnya pun biasa-biasa saja. Baik atau tidaknya kualitas pendidikan akan ditentukan oleh sistem yang diterapkan.

Reformasi sistem pendidikan nasional dari sentralistik kepada sistem desentralistik (otonomi sekolah) merupakan suatu langkah maju pemerintah untuk perbaikan mutu pendidikan ke depan. Perubahan sistem pendidikan nasional dari undang-undang nomor 2 tahun 1989 menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2003, merupakan upaya pembaharuan sistem pendidikan ke arah peningkatan mutu. Upaya peningkatan mutu beralih menjadi tanggung jawab madrasah/sekolah dengan diberlakukannya manajemen berbasis

sekolah/madrasah (MBS/M) sejalan dengan era otonomi daerah. Banyak konsep pendidikan dalam undang-undang sisdiknas 2003 bernilai filosofis yang dapat mengaktualisasikan paradigma baru melalui penerapan manajemen berbasis sekolah/madrasah untuk membentuk nilai-nilai pendidikan bermutu.

Masyarakat Indonesia sudah mulai menyadari bahwa pendidikan adalah suatu kebutuhan, karena masyarakat menyakini bahwa pendidikan akan mampu menjawab dan mengantisipasi berbagai tantangan global. Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah/madrasah sebagai instansi tempat masyarakat berharap tentang kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, terlebih pendidikan di madrasah. Madrasah merupakan sistem pendidikan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat secara demokratis (dari, oleh dan untuk masyarakat), bahkan kehadirannya telah lebih dahulu dibandingkan dengan sekolah umum.¹

Perkembangan madrasah sejak pertengahan tahun 1970-an, jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kini, madrasah semakin menunjukkan perkembangannya ke arah yang lebih signifikan. Belakangan ini, terutama sejak diterapkan UU nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN), posisi madrasah sejajar dengan sekolah umum. Di dalam Undang-Undang no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), lebih tegas lagi

¹ E.Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, Jakarta : t.np.2003, hal. 91

dinyatakan bahwa madrasah adalah sekolah umum sebagaimana sekolah umum lainnya.²

Dengan dasar perundang-undangan tersebut ekseistensi madrasah sekarang sudah menjadi pilihan utama masyarakat muslim untuk menyekolahkan anaknya di madrasah karena mereka yakin bahwa pendidikan yang bernuansa agama akan mampu membentuk karakter yang lebih baik.

Proses pengelolaan pendidikan dengan mengacu pada tujuan UU nomor 20 tahun 2003 tersebut di atas dan Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, harus mampu mempersiapkan out-put terbaik dibidang pendidikan dalam memasuki era global. Seiring dengan itu harapan pemerintah kota Palangka Raya dengan Perda nomor 20 tahun 2007 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di kota Palangkaraya yang menghendaki bahwa kota Palangka Raya akan dijadikan kota pendidikan dan Kalteng Harati yang dicanangkan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah harus kita dukung sepenuhnya. Berdasarkan realita kebutuhan masyarakat, pendidikan harus mampu mengembangkan berbagai ranah pendidikan (pengetahuan, keterampilan dan sikap). Hasil belajar dapat ditandai dengan terwujudnya tiga ranah afektif, kognitif dan psikomotorik. Perwujudan tiga ranah tersebut akan ditentukan oleh sistem manajemen yang tepat.

² UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 17 ayat 2.

Manajemen berbasis sekolah/madrasah begitu penting dan tepat dalam menentukan kebijakan dan strategi pendidikan. Terlebih dengan adanya reformasi pendidikan nasional dari sentralistik menuju ke sistem desentralistik (otonomi sekolah) merupakan suatu langkah yang perlu segera direalisasikan secara utuh. Manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan dalam hal ini kepala sekolah dan guru dibantu komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Selanjutnya UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 51 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

Ekonom Amerika, Friedman, sebagaimana dikutip oleh Zamroni, mengatakan bahwa sekolah-sekolah harus diorganisir secara desentralistik, bahkan lebih ekstrim lagi sekolah harus mandiri dalam melaksanakan pendidikannya.³ Jika semua lembaga pendidikan diberi wewenang yang lebih besar, maka diharapkan mereka akan bersaing dengan sehat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini diharapkan dapat membawa dampak terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja sekolah, dengan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian pemerintah tetap bertanggung

³ Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa depan*, Yogyakarta :Biograf Publishing, 2000, h. 20.

jawab sebagai fasilitator, mediator, monitor, dan yang terpenting adalah sebagai penyanggah dana pendidikan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, pasal 31 ayat 2.⁴

Berkenaan dengan hal tersebut, kualitas pendidikan dapat dihasilkan apabila semua unsur terkait dapat bersinergi dalam upaya mencapai tujuan. Salah satu cara untuk pencapaian tujuan dimaksud adalah pengembangan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) atau Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di lembaga-lembaga pendidikan. Dengan MBM diharapkan dapat membuat madrasah lebih memberdayakan semua potensi sekolah dalam ranah otonomi dan mendorong sekolah mengambil keputusan secara partisipatif yang melibatkan semua warga sekolah dan pihak masyarakat yang dilayani (stakeholder).⁵

Menurut Djam'an Satori yang dikemukakan oleh Jamal Ma'mur Asmani bahwa Implementasi Manajemen Sekolah bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara memberdayakan seluruh potensi sekolah dan *stakeholder*-nya sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan menerapkan kaedah-kaedah manajemen pendidikan/sekolah profesional.⁶ Kebersamaan semua elemen sekolah sangat menentukan keberhasilan suatu lembaga.

⁴ "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

⁵ Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, Model Pengelolaan di Era Otonomi Daerah*, Sagung Seto, Jakarta : 2009, h. 31

⁶ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*, Yogyakarta: Diva Press, 2012, hal. 48.

Sumber daya yang paling penting adalah sumber daya manusia sebagai sosial capital. Terutama kepala sekolah dan semua guru senantiasa mampu menggali dan bekerjasama dengan berbagai sumber daya manusia yang dianggap dapat membantu keberhasilan sekolah. Menurut Ahmad Qomari bahwa pelayanan pendidikan di Kalteng dapat semakin berkualitas agar peningkatan dan pencapaian tujuan Kalteng Harati semakin cepat terealisasi, tentunya dengan dukungan semua pihak terkait.⁷

Manajemen berbasis Sekolah dalam implementasinya mampu mengelola sumber daya sekolah yang sangat beragam (multiplesmart) yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah, dengan mengikutsertakan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah.⁸ Semua komponen terkait tersebut harus mampu menciptakan kondisi yang lebih komunikatif, integrative, sehingga terbentuk kegiatan yang bersinergi dalam berbagai aspek. Disebutkan juga dalam peraturan pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 49 ayat 1 dinyatakan “Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas”. Peraturan Menteri Agama RI nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

⁷ Ahmad Qomari (Kabid PSNP disdik prov.kalteng), “*Kualitas Layanan Pendidikan di Kalteng Meningkat*”, Kalteng Pos, edisi 5 Desember 2014, hal. 16

⁸ Riyanta, “*Unsur Penting dalam Manajemen yang Berbasis Sekolah*”, KaltengPos, edisi Rabu, 26 Nopember 2014, hal. 28.

Madrasah, dinyatakan; “ Pengelolaan madrasah dilakukan dengan menerapkan manajemen berbasis madrasah yang dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan dan partisipasi, nirlaba, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas.” Oleh karena itu MBM perlu diterapkan karena madrasah lebih mengetahui tentang kekuatan, kelemahan, kebutuhan, peluang dan ancaman bagi sekolahnya sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan sekolah/madrasah.⁹

Dari berbagai konsep di atas dapat dinyatakan bahwa penerapan manajemen berbasis madrasah dapat memberikan nilai positif yang sangat menentukan perkembangan pendidikan ke depan. Perkembangan ini akan dapat dicapai apabila MBS/M ini mampu diimplementasikan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip MBS/M di semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta, termasuk di MIN Kereng Bangkirai Palangka Raya. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah prinsip-prinsip MBS/M di MIN Kereng Bangkirai ini sudah dapat diimplementasikan dengan baik atau belum.

Menurut pengamatan secara umum madrasah ini cukup menarik untuk diteliti, karena walaupun berada di pinggiran kota dengan tingkat ekonomi masyarakat/orang tua peserta didik menengah ke bawah akan tetapi mereka

⁹ Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Sagung Seto, h.31.

dapat bersinergi untuk menjadikan madrasah ini lebih baik lagi.¹⁰ Berbeda dengan beberapa SDN di sekitarnya, pihak orang tua siswa lebih banyak menyerahkan segalanya kepada pihak sekolah untuk kelangsungan pendidikan anaknya.¹¹ Sedangkan di MIN Kereng Bangkirai ini, menurut kepala madrasah ;

Alhamdulillah orangtua peserta didik dan masyarakat sekitar sudah memahami sebagai mitra dalam upaya mengembangkan beberapa faktor peningkatan pendidikan, diantaranya; 1) pengadaan pasilitas dan biaya ekskul kegiatan (drumband, seni tari, rebbana, hadrah, seni baca Al-Quran, dll), 2) biaya belajar tambahan (perbaikan dan pengayaan), 3) biaya pengadaan, perbaikan, pasilitas penunjang lainnya, 4) sekarang yang sedang berjalan perencanaan pembangunan kantin sehat yang diperkirakan memerlukan biaya ratusan juta rupiah.¹²

Selain dari tingkat partisipasi orang tua siswa/masyarakat tersebut, tingkat disiplin kerja semua personil sudah cukup membanggakan, kebersamaan dan saling menghargai satu sama lain warga madrasah cukup baik.¹³ Jumlah siswa baru 3 (tiga) tahun terakhir selalu bertambah. Tingkat prestasi ujian akhir siswa di tahun terakhir hampir menyamai MIN terbaik di kota Palangka Raya walaupun penerimaan siswa baru tidak melalui seleksi.¹⁴ Dari semua hal

¹⁰ Informasi dari beberapa orang tua pesera didik dan wali kelas I MIN Kereng Bangkirai hari Sabtu 7 Januari 2015

¹¹ Informasi dari kepala SDN-3 dan 2 Kereng Bangkirai Palangka Raya hari Sabtu 10 Januari 2015

¹² Informasi dari kepala MINKereng Bangkirai Palangka Raya, hari Sabtu, 7 Pebruari 2015 Pk. 10.00 wib

¹³ Hasil pengamatan beberapa waktu sebelum penelitian, Nopember 2014 s/d pebruari 2015

¹⁴ Informasi waka bidang kurikulum dan pengajaran, hari Sabtu 7 Pebruari 2015 pk. 10.00 wib.

tersebut yang utama adalah komitmen dan semangat kepala madrasah dalam menerapkan manajemen berbasis madrasah cukup tinggi.

Beberapa hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam di Madrasah ini dengan mengarahkan pada **Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah (Studi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kereng Bangkirai Palangka Raya).**

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Sebagaimana rencana judul penelitian di atas maka fokus yang akan diteliti adalah pada manajemen madrasah di MIN Kereng Bangkirai Palangkaraya sedangkan sub pokok penelitian ini adalah pada bidang-bidang yang mendukung terwujudnya manajemen berbasis madrasah (MBM) yang baik di MIN Kereng Bangkirai Palangkaraya, yakni ; (1) Kurikulum dan Pengajaran di MIN Kereng Bangkirai, (2) Kesiswaan MIN Kereng Bangkirai, (3) Guru dan Tenaga Kependidikan MIN Kereng Bangkirai, (4) Sarana dan prasarana MIN Kereng Bangkirai, (5) Sumber Keuangan MIN Kereng Bangkirai, (6) Hubungan sekolah/madrasah dengan masyarakat, dan (7) Layanan khusus di MIN Kereng Bangkirai

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan, dan pokok penelitian tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Madrasah di MIN Kereng Bangkirai Palangka Raya ?
2. Mengapa prinsip-prinsip manajemen berbasis madrasah dapat diimplementasikan di MIN Kereng Bangkirai Palangka Raya ?

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan, bagi kepala madrasah dan guru khususnya pada MIN Kereng Bangkirai Palangka Raya dalam upaya mengelola madrasah dan pencapaian kualitas maupun kuantitas melalui penerapan Manajemen Berbasis Madrasah.
2. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti berikutnya.